

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Depok: Penebar Swadaya Group, 2011.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022.
- Octarina, Nynda Fatmawati. *Pidana Pemberitaan Sosial*. Malang: Setara Press, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Rakyat bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Sambas, Nandang, dan Ade Mahmud. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Sofyan, Muhammad Andi. **Hukum Pidana Indonesia.** Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023.
- Suseno, Sigid. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung, 2012.
- Syahdeni, Sutan Remy. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama, 2009.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

JURNAL

- Aji, Adiguna Bagas Waskito, Puji Wiyatno, Ridwan Arifin, dan Ubaidillah Kamal. "Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020).
- Aulia, N. Z., A. Zafira, dan R. Margarettha. "Anti-SLAPP: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup." *Jurnal Legislatif* 5, no. 1 (2021).
- Febriyani, Mery. "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial." *Jurnal Poenale* 6, no. 1 (Mei 2018).
- Harahap, I., dan R. Pratiwi. "Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia." *Jotika Research in Business Law* 2, no. 2 (2023).
- Hernanda, D. A., dan E. Rusdiana. "Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*” Novum: Jurnal Hukum (2021).
- Kardiyasa, I Made, dkk. “Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (Maret 2020).
- Mangantibe, Veisy. “Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.” *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 1 (Januari 2016).
- Mufti, Nisaul, dan Wartiningsih. “Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan.” *Simposium Hukum Indonesia 1*, no. 1 (2019).
- Sembiring, Raynaldo. “Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan Terjadinya SLAPP terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan.” *Jurnal Hukum Lingkungan* 1 (2014).
- Setiawan, H., dan T. H. Sitabuana. “Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 1: 145–157. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/11153>.

ARTIKEL WEB

- Alvin. “Kronologi Aktivis Lingkungan Hidup Daniel Frits Maurits Tangkilisan yang Dijerat UU ITE.” *Penasihat Hukum*. Diakses pada 08 April 2024. <https://penasihathukum.com/kronologi-aktivis-lingkungan-daniel-frits-maurits-tangkilisan-dijerat-uu-ite>.
- Indonesian Center for Environmental Law. “Menilik Konsep Anti-SLAPP di Berbagai Negara.” ICEL. Diakses 6 Juni 2024. <https://icel.or.id/media/pdf/>.
- Wayler, Rex. “Sejarah Singkat Mengenai Gerakan Perlindungan Lingkungan Hidup.” Greenpeace Indonesia. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/2577/sejarah-singkat-mengenai-gerakan-perlindungan-lingkungan-hidup/>.
- KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses pada 20 November 2024. <https://kbbi.web.id/media>.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1), (3), dan (4), serta Pasal 66.

PUTUSAN PERADILAN

Indonesia.	Putusan	Pengadilan	Negeri	Jakarta	Pusat	Nomor
14/Pid.Sus/2024/PN.JPA.						
Indonesia.	Putusan	Pengadilan	Negeri	Jakarta	Pusat	Nomor
14/Pid.Sus/2024/PN.JPA.						
Indonesia.	Putusan	Pengadilan	Negeri	Jakarta	Pusat	Nomor
14/Pid.Sus/2024/PN.JPA.						
Indonesia.	Putusan	Pengadilan	Tinggi	Semarang		Nomor
374/Pid.Sus/2024/PT.SMG.						
Indonesia.	Putusan	Pengadilan	Tinggi	Semarang		Nomor
374/Pid.Sus/2024/PT.SMG.						
Indonesia.	Putusan	Pengadilan	Negeri	Jakarta	Pusat	Nomor
14/Pid.Sus/2024/PN.JPA.						
Indonesia.	Putusan	Pengadilan	Negeri	Jakarta	Pusat	Nomor
14/Pid.Sus/2024/PN.JPA.						
Indonesia.	Putusan	Pengadilan	Tinggi	Semarang		Nomor
374/Pid.Sus/2024/PT.SMG.						
Indonesia.	Putusan	Pengadilan	Tinggi	Semarang		Nomor
374/Pid.Sus/2024/PT.SMG.						
Indonesia. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang						
Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG.						

